

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmadja, I Dewa Gede dkk, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 109
- Aziz, Moh. Ali dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta , 2008, hlm 36
- Eko Anton Rubiantoro, “*Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya Penghijauan pada Kawasan*
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008 hlm, 10.
- Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I*, (Jakarta: Granit, 2007), hlm. 21-22.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 20.
- Idrus, Muhammad., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, PT. Erlangga, Jakarta, 2009.

- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 79.
- Kadarman, A.M., dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT.Prenhallindo, 2001), hlm. 159
- Kelvin, Claudius. 2008. Penghijauan Kota Sebagai Penyeimbang Suhu Lingkungan. Jakarta: claudiuskelvin.blogspot.com/2008/09/pengertian-penghijauan.
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994.), hlm. 104.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2010.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 6.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 57.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 38.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 26.

Wahid, A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 185.

Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 585

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan RENSTRA.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DLH.

Jurnal

2013. *Hunian Padat di Kelurahan Serengan – Kota Surakarta*”, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 9 (4): 416-428. diakses Desember.

Yazid, Y. & Alhidayatillah, N., 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan. Jurnal Risalah. Volume 28 No. 1*, diakses pada 26 Juni 2022.

Website:

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
<https://dlh.semarangkota.go.id/penghijauan-kota-wujud-pelestarian-lingkungan-hidup-perkotaan/>, (diakses pada tanggal 27 Juli 2021 jam 17.25 WIB).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
<https://dlh.semarangkota.go.id/profil-dlh/>, (diakses pada 5 November 2020, pukul 18.50).

Imansyah, *pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*, (<http://tribunpemberdayaanlingkungan.blogspot.com> , diakses 8 Juli 2009)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo,
<http://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diakses pada
5 November 18:10)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang,
<https://dlh.semarangkota.go.id/profil-dlh/> (diakses pada 25 Oktober
2018, pukul 19:13).

Sumber lain:

<media.leidenuniv.nl/legacy/bbri-socio-legal-studies-final.pdf> diunduh pada
tanggal 6 Oktober 2016 jam 11:50 WIB.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2011.

Undang Undang Dasar 1945

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. *Sistem dan Mekanisme
Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. (Jakarta: Direktorat
Publikasi Ditjen Pembinaan Pers & Grafika Departemen Penerangan RI,
1992), hlm. 31.

Jimly Asshiddiqie, *Undang Undang Dasar 1945:Konstitusi Kemajemukan
Berbangsa dan Bernegara*, Makalah yang disampaikan pada rangka

Gus Dur *Memorial Lecture* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Jakarta 2011.

Hunian Padat di Kelurahan Serengan – Kota Surakarta”, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Volume 9 (4): 416-428 Desember 2013.Hlm.42

